

## Ada 492 Hektare Kawasan Kumuh di Pemrov Banten

**SERANG (IM)**- Ada 492 hektare kawasan kumuh di Banten yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Tahun ini, seluas 109,42 hektare kawasan kumuh itu ditangani.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten, M Rachmat Rogianto mengungkapkan, dari seluruh kawasan kumuh yang ada di Banten, yang menjadi kewenangan Pemprov ada sekitar 492 hektare.

Dari luasan itu, pihaknya menargetkan penanganannya di 360 hektare. "Tapi kami sudah tangani 392 hektare, melampaui target," ujarnya, Rabu (20/9).

Ia mengungkapkan, ada beberapa program pembangunan infrastruktur yang dilakukan di kawasan kumuh tersebut.

Yakni bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, penge-

lolaan persampahan, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau/ruang publik, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.

Namun, Rachmat menjelaskan, tidak secara keseluruhan ratusan hektare itu dibangun. "Tapi pada spot-spot tertentu yang memang perlu ditangani. Misalnya kawasan kumuh di Desa A, ada drainase yang dibangun sepanjang 10 meter. Misalnya begitu," terangnya.

Kata dia, seluas 109,42 hektare kawasan kumuh yang ditangani tahun ini berada di Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Di Kota Serang ada di Kelurahan Pagerang, Kecamatan Walantaka dan Kelurahan Tembong, Cipocokjaya.

Sedangkan di Kabupaten Serang ada di Desa Dukuh, Desa Pamong, Desa Sukajadi yang berada di Kecamatan Kragilan.

Sementara itu, ada juga di Desa Carita, Desa Banjarmasin, Desa Mekarsari, kecamatan Panimbang dan Desa Cibaling, Kecamatan Cibiliung, Kabupaten Pandeglang. ● pra



### SOSIALISASI KESELAMATAN PERLINTASAN KERETA API

Petugas gabungan melakukan sosialisasi keselamatan perlintasan sebidang di pintu perlintasan kereta api Tanjung, Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (20/9). PT KAI Daop 5 Purwokerto lakukan sosialisasi keselamatan perlintasan sebidang bersama DJKA Kemhub, Dishub Pemkab Banyumas, TNI dan Polri, seiring dengan semakin meningkatnya perjalanan KA.

## 3.830 Personel Gabungan Amankan Pilkades Serentak di Tangerang

Koordinasi untuk pengamanan pilkades serentak ini terus dilakukan dan juga disiapkan tim khusus untuk menjaga ketertiban di beberapa wilayah yang dinilai rawan terjadinya kerusuhan. Penyelenggaraan pilkades serentak di Kabupaten Tangerang ini akan digelar pada 24 September 2023 di 13 Kecamatan dari 16 desa dengan 74 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**TANGERANG (IM)**- Sebanyak 3.830 personel gabungan dari Satpol PP Kabu-

upaten Tangerang, Banten bersama TNI/Polri akan mengamankan 16 tempat

pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2023 di daerah itu.

Kasatpol PP Kabupaten Tangerang, Agus Suryana di Tangerang, Rabu (20/9) mengatakan koordinasi untuk pengamanan pilkades serentak ini terus dilakukan dan tinggal menunggu pelaksanaan.

"Dari aspek pengamanan kita mengerahkan sebanyak 3.830 personel mulai H-3 sampai H+3. Dan kita dalam pengamanan ini tiga Polres, Metro, Tangerang Selatan, dan Tigaraksa," katanya.

Menurut dia, dari ribuan personel pengamanan itu akan

mulai bertugas sejak H-3 yaitu pada 22 September sampai H+3 pada 25 September 2023.

Selain itu, ia juga menjelaskan personel gabungan tersebut bakal memastikan logistik pilkades harus sudah siap pada satu hari sebelum penoblosan di tempat pemungutan suara (TPS).

"Dan itu dilakukan mulai dari pengamanan kotak suara, pengamanan penghitungan sampai pengamanan waktu penetapan," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam hal ini sistem pengamanan yang akan dilakukan melalui

monitoring 3x24 jam dan membagi pemeataan pengamanan menjadi empat wilayah.

"Kita juga menyiapkan tim khusus untuk menjaga ketertiban di beberapa wilayah yang dinilai rawan terjadinya kerusuhan. Yang disiapkan itu baik dari personel kita, Intel Polres, Kodim dan Korem," kata dia.

Seperti diketahui, penyelenggaraan pilkades serentak di Kabupaten Tangerang akan digelar pada 24 September 2023 di 13 Kecamatan dari 16 desa dengan 74 Tempat Pemungutan Suara (TPS). ● pp

SUDAH BERALIH FUNGSI JADI PABRIK

## Puluhan Situ Milik Pemrov Banten Dikuasai Swasta

**SERANG (IM)**- Sebanyak 36 situ milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dikuasai pihak swasta. Hal itu berdasarkan temuan Kejaksaaan Negeri (Kejati) Banten saat melakukan inventarisasi aset milik Pemprov Banten.

Kepala Kejati Banten, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, berdasarkan hasil inventarisasi pihaknya menemukan ada 137 situ yang saat ini statusnya sudah milik Pemprov Banten. Namun, 36 situ di antaranya dikuasai oleh pihak swasta.

"Kita catat ada 36 situ yang tersebar di delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten yang saat ini statusnya milik Pemprov Banten tetapi tidak dalam penguasaan Pemprov. Melainkan dikuasai pihak swasta," ujar Kajati kepada wartawan, Rabu (20/9).

Kajati mengungkapkan, puluhan situ itu kini telah dialihfungsikan oleh pihak swasta menjadi daratan bahkan menjadi kawasan pabrik.

Padahal, Kajati menyebut, situ memiliki fungsi untuk penampungan air yang bisa digunakan oleh warga sekitar khususnya di musim kemarau saat ini.

"Situ ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk cadangan air warga, dan saat ini kita tengah melakukan upaya untuk mencoba mengembalikan fungsi dari situ ini sebagai cadangan air masyarakat," ucapnya.

Pihaknya melalui seksi perdata dan tata usaha (Datun) masih akan melakukan inventarisasi situ yang dikuasai swasta tersebut. "Kita lagi inventarisasi dulu, situ ini dikuasai siapa saja dan bagaimana bisa beralih ke swasta," ujarnya. ● pra

SETELAH KUALITAS AIR BAKU TURUN

## PDAM Tangerang Lakukan Penyaringan Dua Tahap

**TANGERANG (IM)**- Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang melakukan pengolahan atau penyaringan dua tahap terkait kondisi Sungai Cisadane alami penurunan kualitas air baku akibat kemarau. Direktur Teknik, Perumda Tirta Beteng, Joko Surana mengatakan penyaringan dua kali dilakukan untuk menjaga standar atau kualitas air yang didistribusikan untuk seluruh pelanggan.

"Kepada para pelanggan diminta untuk tidak khawatir atau panik dengan kondisi kemarau yang tengah melanda Kota Tangerang dan sekitarnya. Secara kuantitas dalam kondisi aman," kata Joko dalam keterangannya, Rabu (20/9).

Perumda Tirta Benteng juga menyatakan stok air bersih untuk Kota Tangerang tetap aman, khususnya para pelanggan. Diakuinya, debit Sungai Cisadane beberapa hari lalu sempat mengalami penyurutan. Namun pada Selasa (19/9) kondisi batas air kembali normal di 12 meter.

"Batas normal 12 meter, menyatakan stok atau kuantitas air dalam kondisi aman. Na-

mun, secara kualitas mengalami penurunan, salah satunya karena titik hulu belum juga dilanda hujan," kata Joko.

Hingga saat ini belum ada laporan atau keluhan kekering-an yang dialami para pelanggan Perumda Tirta Benteng. Namun, Perumda Tirta Benteng telah menyediakan posko layanan atau aduan yang siap siaga melayani kebutuhan, keluhan atau kendala yang dihadapi para pelanggan.

Pelanggan bisa datang langsung ke Kantor Perumda Tirta Benteng atau melakukan pelaporan secara online di nomor 021-5587234. "Kami menyiapkan armada air, untuk menyajikan bantuan air bersih gratis untuk warga yang membutuhkan," ujarnya.

Sebelumnya Kepala BPBD Kota Tangerang, Maryono juga mengatakan jika pihaknya sudah menyiapkan truk tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang alami kekeringan. Selain itu, BPBD juga mengajak warga untuk membuat titik resapan dalam membuat cadangan air di dalam tanah terkait musim kemarau. ● pp

## Melalui PLM Nasional 2023, Gubernur DIY Ajak Masyarakat Ubah Mindset Perpustakaan

**YOGYAKARTA (IM)** - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mendukung penuh acara Peer Learning Meeting (PLM) Nasional yang digelar Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. PLM Nasional merupakan kegiatan sharing knowledge dan berbagi pengalaman dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (IPBIS).

Tahun ini, PLM Nasional mengusung tema "Menguatkan Literasi menuju Masyarakat Sejahtera melalui Perpustakaan Kreatif dan Inovatif". Melalui PLM Nasional 2023, Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk mengubah mindset mengenai perpustakaan bukan sebagai "kata benda" semata, tetapi "kata kerja".

Menurutnya, secara hakikat perpustakaan bersifat penuh dinamika dan bergerak progresif untuk maju. "Mari lanjutkan kolaborasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera, di mana literasi adalah cahaya yang mengusir kegelapan ketidaktahuan, di mana setiap warga memiliki akses terbatas pada pengetahuan, dan perpustakaan menjadi pusat kreativitas dan inovasi," ujarnya dalam Pembukaan PLM Nasional 2023 di Hotel Alanda, Yogyakarta, pada Rabu (20/9).

Selain mengikuti kegiatan PLM Nasional, Gubernur mengajak seluruh peserta untuk menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya Yogyakarta.

Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando berharap para peserta PLM Nasional dapat meningkatkan motivasi, komitmen dan kepercayaan diri untuk menjalankan program TPBIS secara berkelanjutan.

Selama lima tahun terakhir sejak 2018, program TPBIS berhasil membangun kapasitas 2.672 pengelola perpustakaan desa, 153 master trainer, dan 584 fasilitator daerah. Selain itu, sebanyak 2.017.379 anggota masyarakat mengikuti 115.923 kegiatan di perpustakaan. Kegiatan PLM juga sudah direplikasi secara mandiri oleh mitra di 2.011 desa/kecamatan.

Ditambahkannya, para pengelola perpustakaan menghadapi tantangan yang kompleks seperti perubahan teknologi atau kebijakan. Dalam pertemuan PLM Nasional, dia berharap para pengelola perpustakaan dapat berdiskusi cara mengatasi tantangan tersebut secara bersama-sama, yang dapat menghasilkan solusi lebih baik.

"Harapannya seluruh peserta dapat memanfaatkan peer learning meeting sebagai momen yang berguna untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan, mengatasi tantangan yang dihadapi, dan memperluas pengetahuan dan jaringan profesional pengelola perpustakaan," kata Kepala Perpusnas.

Dia menambahkan, para peserta diharapkan menggunakan kegiatan PLM Nasional untuk membangun jaringan

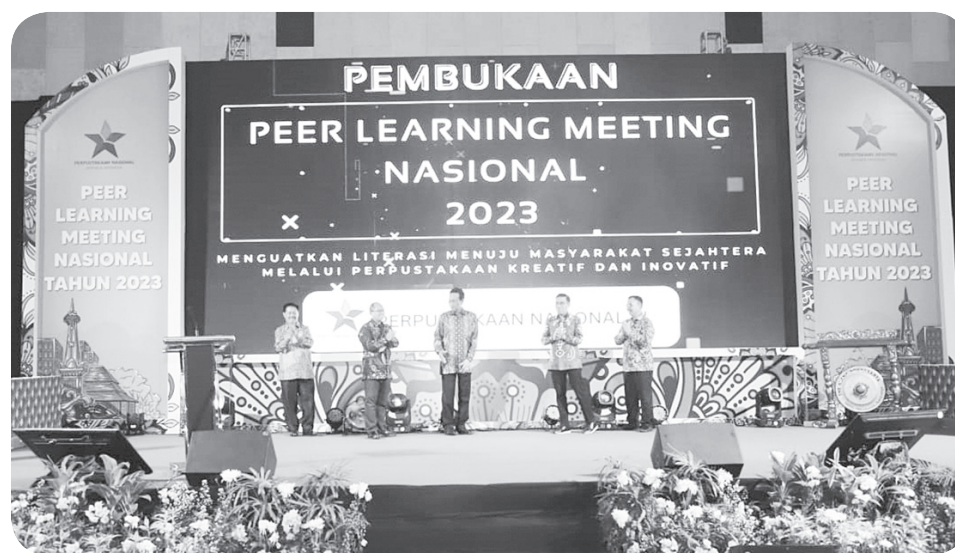
profesional dalam bidang perpustakaan. Melalui interaksi dengan rekan-rekan sejawat, pengelola perpustakaan dapat memperluas circle dan potensi berkolaborasi dalam proyek-proyek masa depan.

"Mari kita upayakan bersama agar seluruh peserta merasa termotivasi dan terinspirasi untuk mengembangkan ide-ide baru dan meningkatkan kinerja mereka dalam pekerjaan mereka," lanjutnya.

Sementara itu Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar menjelaskan PLM Nasional tahun 2023 diikuti secara luring oleh 1.100 peserta dari seluruh Indonesia dan 1000 secara luring.

Selain Gubernur DIY, PLM Nasional 2023 juga dihadiri Hary Budiarto (Kepala BPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika RI), Rulli Nuryanto (Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UMKM RI), Hasto Wardoyo (Kepala BKKBN), Chaidir Syam

PLM Nasional merupakan salah satu tahapan program TPBIS. Program TPBIS merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. ● bam



Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X (tengah) dan Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando (paling kiri) saat prosesi pembukaan Peer Learning Meeting Nasional 2023.

## Bupati Ahmed Zaki Lantik 631 Pegawai Pemkab Tangerang

**TANGERANG (IM)**- Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar melantik sebanyak 631 pegawai untuk proses promosi dan rotasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 599 pegawai dan 32 jabatan fungsional yang menjalani proses promosi dan rotasi. Kegiatan ini merupakan proses penyesuaian dan memberikan suasana baru dalam bekerja di kalangan pegawai.

"Melalui momentum ini, saya berpesan kepada saudara-saudara yang telah dilantik dan diambil sumpahnya agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan, agar seluruh proses penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kabupaten Tangerang dapat berjalan dengan satu visi dan misi Kabupaten Tangerang," katanya, Rabu (20/9).

Bupati Zaki berpesan kepada para pegawai agar tetap fokus dalam menuntaskan target kegiatan serta tetap responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan

Fungsional.

Pengukuhan, pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PNS tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kelayakan berdasarkan proses kepatutan, kecakapan dan pengalaman yang cukup serta loyalitas dan dedikasi terhadap pekerjaan.

"Proses mutasi adalah suatu bentuk upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan terutama yang berkaitan dengan program-program prioritas yang telah tertuang dalam RPJMD yang akan selesai tahun depan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hendar Herawan, menjelaskan, proses mutasi mengacu pada Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru berdasarkan Kepmendagri No 050 di mana seluruh instansi, baik daerah maupun pusat, menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan pengukuhan.

"Kegiatan hari ini dimulai dengan seremonial pengukuhan, hampir 300 PNS Kabupaten Tangerang yang dikukuhkan dalam jabatan yang sama dengan nomenklatur jabatan berbeda lalu selanjutnya promosi dan mutasi rotasi terutama dengan masa penugasan lima tahun bertujuan untuk penyesuaian dan efisiensi dalam bekerja," pungkasnya. ● pp



### PENGENALAN BAHASA ISYARAT KEPADA PELAJAR

Guru SLB mempraktekkan cara berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat kepada siswa di Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (20/9). Pengenalan bahasa isyarat kepada pelajar itu untuk mengajarkan cara berinteraksi kepada orang penyandang disabilitas tuna wicara dan tuna rungu guna menumbuhkan rasa empati kepada sesama.

## Pemkot Serang Bangun Embung untuk Atasi Gagal Panen Musim Kemarau

**SERANG (IM)**- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bakal membangun embung atau penampung air pada 2024 yang salah satu tujuannya untuk mengatasi gagal panen pada saat musim kemarau di wilayah setempat.

Wali Kota Serang, Syafrudin, di Serang, Banten, Rabu (20/9), mengatakan, pembangunan embung sebagaimana usulan DPRD merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kekeringan.

"Ini saran yang bagus dorongan dari desaw, pembuatan embung di masing-masing Kecamatan, khususnya di Kecamatan yang sering terjadi kekeringan seperti Kasemen, Walantaka dan Taktakan," katanya.

Syafrudin menyampaikan, untuk rencana pembuatan embung ini baru akan dianggarkan paling lambat pada 2024 mendatang. "Nampaknya kalau di perubahan ini tidak akan kekejar, maka paling lambat akan dianggarkan pada tahun 2024. Untuk lahan nanti bisa dicari," katanya menambahkan.

Pemkot Serang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak krisis air bersih.

"Kita terus melakukan koordinasi bersama dengan Perumda Tirta Madani, BPBD, hingga Perkim untuk mengatasi masalah kekeringan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pertanian dan Penyuluhan (DKPPP) Kota Serang, Andriyani mengatakan, 115 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan. Di antaranya 78 hektar kekeringan ringan, delapan hektar kekeringan sedang, 11 hektar kekeringan berat, dan 18 hektar puso. "Berdasarkan laporan dari petugas PUPU yang memverifikasi, lahan persawahan yang mengalami kekeringan hampir terjadi di semua kecamatan," katanya.

Andriyani mengatakan, dari 115 hektare lahan persawahan yang kekeringan, lahan persawahan yang terbanyak terdampak yakni di Kecamatan Kasemen. ● pra